PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH 2022

PERDA PROVINSI GORONTALO NO. 2, LD 2022/NO.2, NOREG. 2-37/2022: 62 HLM. PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ata Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Penelolaan Barang Milik Daerah.
  - Dasar Hukum pembentukan peraturan ni adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014 beserta perubahannya, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015 beserta perubahannya, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 1 Tahun 2019, Permendagri No. 63 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah-tanganan, Penghapusan, Tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, Pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Pengelolaan barang milik daerah pada perangkatdaerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Barang milik daerah berupa rumah negara, Sistem informasi barang milik daerah, Pemberian insentif dan tunjangan, Koordinasi, Pendanaan, Ganti rugi, Sanksi administratif, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

- CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 13 April 2022.
  - Peraturan daerah ini mencabut Perda Provinsi Gorontalo No. 14 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2017.
  - Batang Tubuh 54 hlm
  - Penjelasan 8 hlm